**UPAYA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DIDALAM PENANGANAN PENGENTASAN KEMISKINAN**



[*https://www.ajnn.net/news/program-unggulan-pemerintah-aceh-turunkan-angka-kemiskinan/index.html*](https://www.ajnn.net/news/program-unggulan-pemerintah-aceh-turunkan-angka-kemiskinan/index.html)

**BAB I. PENDAHULUAN**

Menurut KBBI, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan,yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:[[1]](#footnote-1)

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Dalam hal ini, Pemerintah melakukan Penaggulangan Kemiskinan sebagai kebijakan dan program pemerintah.

Di bawah ini ada pula beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim antara lain:[[2]](#footnote-2)

1. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
2. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
3. Biaya kehidupan yang tinggi.
4. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan dapat dirinci sebagai berikut:[[3]](#footnote-3)

1. Banyaknya pengangguran;
2. Terciptanya perilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan ketika mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan;
3. Banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan;
4. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memtuskan untuk tidak berobat. Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak

Pemerintah melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan cara melakukan penanggulangan kemiskinan yakni kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.[[4]](#footnote-4) Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.[[5]](#footnote-5)

Selain itu, Pemerintah juga membuat arah dan kebijakan Penaggulangan Kemiskinan yakni:[[6]](#footnote-6)

1. Arah dan Kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Arah dan Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Adapun strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:[[7]](#footnote-7)

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutkan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara Nasional, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.[[8]](#footnote-8) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.[[9]](#footnote-9) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.[[10]](#footnote-10)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertugas:[[11]](#footnote-11)

1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

Adapun keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.[[12]](#footnote-12)

**BAB II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Aceh didalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Aceh didalam Melakukan Penanganan Pengentasan Kemiskinan di Aceh dan pada Masa Pandemi COVID-19?

**BAB III. PEMBAHASAN**

1. **Peran Pemerintah Aceh didalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh**

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang disingkat dengan (TKP2K).[[13]](#footnote-13) Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Aceh yang disingkat dengan (TKP2K) adalah Lembaga Pemerintah non-struktural yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi yang diketuai Wakil Gubernur, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.[[14]](#footnote-14)

Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/932/2018. Dasar Hukum pembentukan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.[[15]](#footnote-15)

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

1. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

Kelembagaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:[[16]](#footnote-16)

1. Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Ketua TKPK Provinsi adalah Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur.
3. Sekretaris TKPK Provinsi adalah Kepala Bappeda Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
4. Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat,dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Peraturan Presiden ini.

Dalam hal ini, Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.[[17]](#footnote-17) Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui strategi dan program.[[18]](#footnote-18)

Kelembagaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.[[19]](#footnote-19) Semenatar itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010, pada pasal 8 ditegaskan bahwa TKPK Provinsi bertugas untuk:

1. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi; dan
2. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi.

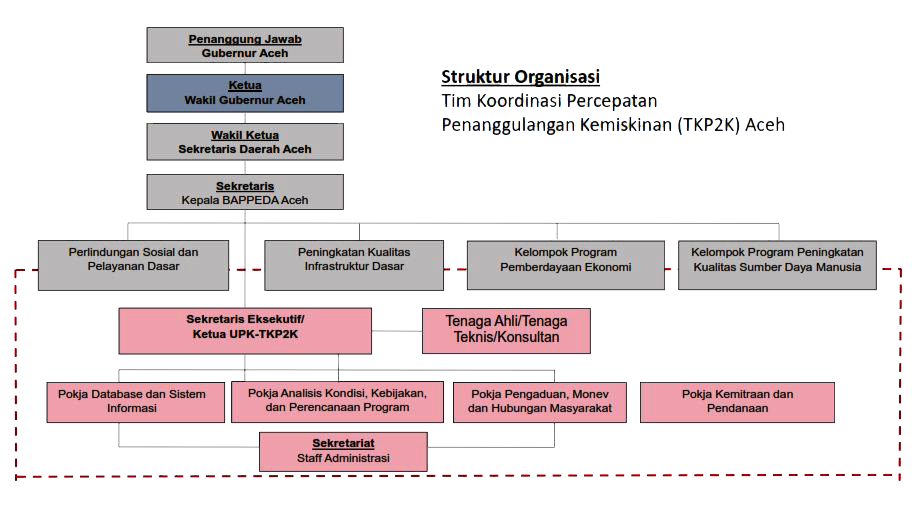
TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi, menyelenggarkan fungsi:[[20]](#footnote-20)

1. Pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
2. Pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
3. Pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
4. Pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD;
5. Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

TKPK Provinsi dalam mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi, menyelenggarkan fungsi:[[21]](#footnote-21)

1. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
4. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pelaksana Khusus Tim Koordinasi Percepatan Penanggulan Kemiskinan Aceh, maka struktur Organisasi Provinsi sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)



1. **Upaya Pemerintah Aceh didalam Melakukan Penanganan Pengentasan Kemiskinan**

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Sebelum pandemi dimulai, pada tahun 2019, Aceh memiliki angka kemiskinan sebesar 15,01%, tertinggi ke-6 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan ini tentu membuat masyarakat Aceh lebih rentan terhadap wabah Covid-19.[[23]](#footnote-23)

Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh telah menyusun dokumen Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh Tahun 2019-2022. Dokumen tersebut berisi tentang kondisi, karateristik dan permasalahan kemiskinan Aceh serta upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Aceh beserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan.[[24]](#footnote-24) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menempatkan masalah kemiskinan diurutan pertama dan menjadi isu global untuk segera ditindaklanjuti.[[25]](#footnote-25) Maka arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang maupun yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 adalah “**Meningkatkan perluasan perlindungan sosial, meningkatkan ketersediaan dan cakupan pelayanan dasar, mengurangi kemiskinan dengan memfokuskan pengembangan, penghidupan berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin**” dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022 adalah “**Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi”**. Dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2012-2032, penanggulangan kemiskinan diterjemahkan ke dalam dua misi, yaitu Misi Kedua **“ Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual” dan Misi ke empat “ Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata”.**[[26]](#footnote-26)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan alat kerja utama Pemerintah Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui program pembangunan yang disepakati bersama antara Gubernur dan DPRA. Target pendapatan Aceh setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan yang menjangkau berbagai wilayah di Aceh terutama DTPK (Daerah terpencil dan Kepulauan). Penciptaan lapangan kerja yang luas, mengatasi kesenjangan antar wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang produktif dan terintegrasi.[[27]](#footnote-27)

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, beberapa kebijakan harus diambil oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota:[[28]](#footnote-28)

1. Menggali Akar Masalah Penyebab Kemiskinan;

Mengetahui akar masalah kemiskinan suatu daerah/wilayah dengan cara melakukan analisis kondisi kemiskinan dan dinamikanya berupa Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas (Kecenderungan Umum) dan Analisis Relevansi Perkembangan.

1. Menemukan Potensi Sumber Daya Alam Dan Unggulan Daerah;

Setiap daerah di Aceh memiliki potensi sumber daya dalam dan potensi sumber daya lain yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik.

1. Menciptakan Kondisi Pemungkin Penanggulangan Kemiskinan;

Dilakukan melalui regulasi maupun kebijakan yang memberi kemudahan, baik bagi masyarakat maupaun bagi pemerintah sendiri.

1. Menguatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

1. Satu Data dalam Sistem Informasi Terintegrasi;

Pemerintah Aceh berkomitmen menggunakan satu data untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu Basis Data Terpadu (BDT). BDT secara berkala akan terus dimuktahirkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta dikelola dalam satu sistem terpadu.

Strategi Utama Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh dapat dibedakan menjadi strategi Mikro dan Strategi Makro, yang terdiri dari:[[29]](#footnote-29)

1. Mengurangi Beban Penduduk Miskin;
2. Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin;
3. Menguatkan Kapasitas Penduduk Miskin;
4. Menekan Biaya Transaksi Ekonomi Pendudukan Miskin, dan
5. Menjaga Stabilitas Harga dan Akses terhadap Bahan Kebutuhan Pokok.

Strategi utama akan berjalan efektif apabila didukung oleh strategi khusus dengan 6 (Enam) ketepatan yaitu:[[30]](#footnote-30)

1. Tepat Fokus (Prioritas Intervensi)
2. Tepat Lokus (Lokasi Intervensi)
3. Tepat Modus (Cara Pelaksanaan)
4. Tepat Sasaran (Penerima Manfaat)
5. Tepat Jumlah ( Biaya Intervensi)
6. Tepat Waktu (Waktu Penyaluran)

Didalam penanggulangan kemiskinan dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko lebih besar. Sedang Evaluasi untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program dalam capaian kinerja masing-masing indikator program.[[31]](#footnote-31)

Salah satu tugas dan kewajiban TKP2K Aceh adalah menyampaikan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Aceh. Laporan ini memuat capaian indikator kemiskinan yang dilihat dari realisasi kegiatan dan anggaran, serta dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.[[32]](#footnote-32)

Menurut Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh, Hasrati Ali, dalam menanggapi pandemi, Pemerintah Aceh melakukan *refocusing* anggaran, dan menggelontorkan dana sebesar 1,7 triliun untuk tiga fokus utama kebijakan yang bisa mengurangi dampak Covid-19 yakni:[[33]](#footnote-33)

1. Pemerintah Aceh memperbaiki pelayanan kesehatan setempat, khususnya untuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 sebelum vaksin penyakit ini tersebar;
2. Pemerintah Aceh akan meningkatkan fungsi program perlindungan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan langsung pemerintah Aceh, dan lain-lain. Program perlindungan sosial dinilai mampu untuk meminimalisir dampak Covid-19 terhadap provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Aceh. Program perlindungan sosial dapat meminimalisir rendahnya gizi, pendidikan, dan kesehatan pada masyarakat miskin, sehingga akan mempengaruhi kualitas angkatan kerja dan dapat menunjang perekonomian Indonesia di masa depan;
3. Pemerintah Aceh berupaya untuk memulihkan perekonomian yang menurun sejak wabah Covid-19 menyebar. Selain upaya pemerintah Aceh untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah Aceh juga akan memberi bantuan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Bantuan ini sangat penting mengingat rendahnya perekonomian sektor sekunder (sektor Industri, sektor listrik, gas, air bersih, sektor bangunan) di Aceh.

**BAB IV. PENUTUP**

1. Peran Pemerintah Aceh didalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh yakni dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang disingkat dengan (TKP2K). Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Aceh yang disingkat dengan (TKP2K) adalah Lembaga Pemerintah non-struktural yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi yang diketuai Wakil Gubernur, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, beberapa kebijakan harus diambil oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota:
3. Menggali Akar Masalah Penyebab Kemiskinan;

Mengetahui akar masalah kemiskinan suatu daerah/wilayah dengan cara melakukan analisis kondisi kemiskinan dan dinamikanya berupa Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas (Kecenderungan Umum) dan Analisis Relevansi Perkembangan.

1. Menemukan Potensi Sumber Daya Alam Dan Unggulan Daerah;

Setiap daerah di Aceh memiliki potensi sumber daya dalam dan potensi sumber daya lain yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik.

1. Menciptakan Kondisi Pemungkin Penanggulangan Kemiskinan;

Dilakukan melalui regulasi maupun kebijakan yang memberi kemudahan, baik bagi masyarakat maupaun bagi pemerintah sendiri.

1. Menguatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

1. Satu Data dalam Sistem Informasi Terintegrasi;

Pemerintah Aceh berkomitmen menggunakan satu data untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu Basis Data Terpadu (BDT). BDT secara berkala akan terus dimuktahirkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta dikelola dalam satu sistem terpadu.

Dalam menanggapi pandemi, Pemerintah Aceh melakukan *refocusing* anggaran, dan menggelontorkan dana sebesar 1,7 triliun untuk tiga fokus utama kebijakan yang bisa mengurangi dampak Covid-19 yakni:

1. Pemerintah Aceh memperbaiki pelayanan kesehatan setempat, khususnya untuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 sebelum vaksin penyakit ini tersebar;
2. Pemerintah Aceh akan meningkatkan fungsi program perlindungan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan langsung pemerintah Aceh, dan lain-lain. Program perlindungan sosial dinilai mampu untuk meminimalisir dampak Covid-19 terhadap provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Aceh. Program perlindungan sosial dapat meminimalisir rendahnya gizi, pendidikan, dan kesehatan pada masyarakat miskin, sehingga akan mempengaruhi kualitas angkatan kerja dan dapat menunjang perekonomian Indonesia di masa depan;
3. Pemerintah Aceh berupaya untuk memulihkan perekonomian yang menurun sejak wabah Covid-19 menyebar. Selain upaya pemerintah Aceh untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah Aceh juga akan memberi bantuan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Bantuan ini sangat penting mengingat rendahnya perekonomian sektor sekunder (sektor Industri, sektor listrik, gas, air bersih, sektor bangunan) di Aceh.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang – undangan**

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Arah Kebijakan, Strategi, Kelembagaan dan Tata Kelola Penanggulan Kemiskinan Aceh.
4. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/932/2018.

**Buku**

1. Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003);
2. Mubyarto, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999);
3. TKP2K Aceh, Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh 2018-2022, (Banda Aceh: 2018).

**Internet**

1. <https://www.ajnn.net/news/program-unggulan-pemerintah-aceh-turunkan-angka-kemiskinan/index.html>;
2. <https://tkp2k.acehprov.go.id/>

http://tnp2k.go.id/articles/penanganan-kemiskinan-di-aceh-pada-masa-pandemi

*Disclamer* : Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

1. Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003), 107. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., 108 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mubyarto, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), Hlm. 20 [↑](#footnote-ref-3)
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, BAB I, Pasal 1 angka [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid angka 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid Pasal 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid Pasal 3 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid Pasal 7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid Pasal 8 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid Pasal 1 Angka 3 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid Pasal 9 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid Pasal 10 ayat (1) [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid Pasal 15 [↑](#footnote-ref-13)
14. https://tkp2k.acehprov.go.id/page/tentang [↑](#footnote-ref-14)
15. Op.Cit Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada bagian Menimbang huruf a [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid Psal 18 ayat (1 s.d 4) [↑](#footnote-ref-16)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 2 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid Pasal 3 [↑](#footnote-ref-18)
19. Op.Cit Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pasal 17 [↑](#footnote-ref-19)
20. Op.Cit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 9 ayat (1) [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid Pasal 9 ayat (2) [↑](#footnote-ref-21)
22. Op.Cit <https://tkp2k.acehprov.go.id/page/tentang> Sturktur Organisasi [↑](#footnote-ref-22)
23. http://tnp2k.go.id/articles/penanganan-kemiskinan-di-aceh-pada-masa-pandemi [↑](#footnote-ref-23)
24. TKP2K Aceh, Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh 2018-2022, (Banda Aceh: 2018) [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid BAB V [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid BAB VII [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid [↑](#footnote-ref-32)
33. Op.Cit http://tnp2k.go.id/articles/penanganan-kemiskinan-di-aceh-pada-masa-pandemi [↑](#footnote-ref-33)